

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: *pertama*, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. *Kedua*, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.¹

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai

¹ Muchsin. 2011. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)". *Varia Peradilan* Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI. Hal. 23.

untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.²

Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti menonton film-film kekerasan, porno bahkan narkoba.

² Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 30.

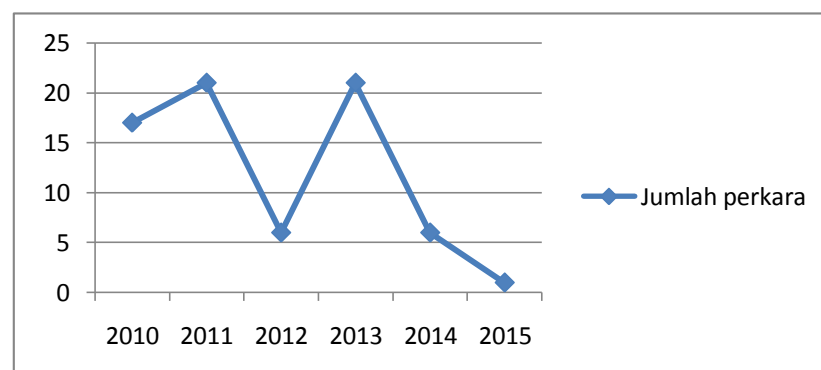
Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan/atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sehingga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Dengan adanya keadaan tersebut di atas, dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu: (a) anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyebutan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang selanjutnya disebut Anak dengan definisi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya, sudah banyak yang diputus oleh pengadilan. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Magetan. Berdasarkan data yang diperoleh selama kurun waktu 6 (enam) tahun (2010 – 2015) jumlah putusan tindak pidana di Pengadilan Negeri Magetan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Putusan Tindak Pidana Anak Tahun 2010-2015

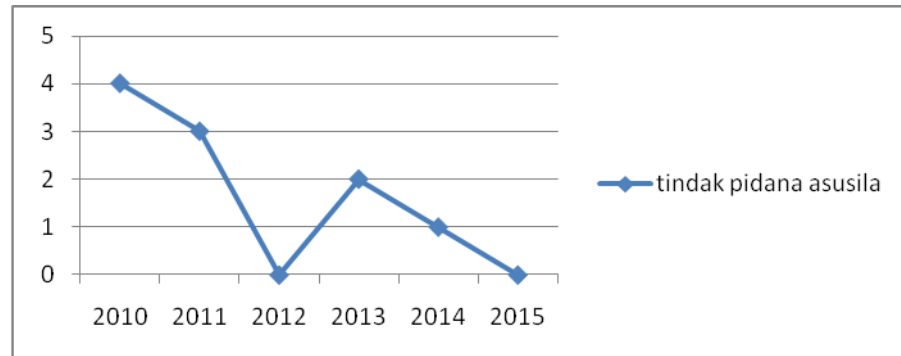


Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Magetan yang sudah diputus oleh hakim pada tahun 2010 terdapat 17 (tujuh belas) perkara, kemudian pada tahun 2011

terdapat peningkatan jumlah perkara tindak pidana anak menjadi 21 (dua puluh satu) perkara, selanjutnya pada tahun 2012 jumlah perkara tindak pidana anak mengalami penurunan menjadi 6 (enam) perkara yang sudah diputus oleh hakim. Tahun 2013 terjadi peningkatan lagi jumlah perkara tindak pidana anak, yaitu menjadi 21 (dua puluh satu) perkara dan pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah perkara tindak pidana anak yang sudah diputus oleh hakim menjadi 6 (enam) perkara. Sementara itu, pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) perkara tindak pidana anak yang sudah diputus oleh hakim. Dengan demikian, pada tahun 2015 terjadi penurunan untuk perkara tindak pidana anak.

Salah satu tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana kesusilaan. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Magetan, fenomena tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi. Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Anak-anak yang melakukan tindak pidana asusila ini memiliki rentang usia 15 (lima belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun sehingga penanganan perkaranya dibedakan dengan orang dewasa. Adapun tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yang perkaranya disidangkan dan diadili di Pengadilan Negeri Magetan pada kurun waktu tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tindak Pidana Asusila Dengan Pelaku Anak Tahun 2010-2015



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yang telah diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Magetan selama kurun waktu 6 (enam) tahun terjadi penurunan jumlah perkara. Pada tahun 2010 terdapat 4 (empat) perkara, kemudian pada tahun 2011 terjadi penurunan perkara menjadi 3 (tiga) perkara dan pada tahun 2012 tidak ada perkara. Namun demikian, pada tahun 2013 terdapat 2 (dua) perkara dan pada tahun 2014 terjadi penurunan perkara yaitu hanya terdapat 1 (satu) perkara. Adapun pada tahun 2015 tidak ada tindak pidana asusila dengan pelaku anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Magetan.

Perkara asusila yang dilakukan oleh anak yang terjadi tahun 2014 tersebut merupakan perkara asusila yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa, yang mana berkas perkara dan pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah (*split*). Tindak pidana asusila dalam berkas perkara yang dilakukan oleh anak, yaitu pada awal mulanya klien yang bernama A.S.R (17 tahun) disuruh menjemput korban yang bernama F.W. (15 tahun) di rumahnya tidak dilaksanakan, namun setelah Agus Sriyanto alias Kencus sedikit

memaksa maka klien berangkat menjemput korban. Klien kemudian terpengaruh dan ikut-ikutan melakukan persetubuhan terhadap korban setelah mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh teman-temannya. Sebelum melakukan persetubuhan klien terlebih dahulu minum-minuman keras bersama ketiga temannya yang sudah berusia dewasa dan menjadikan klien mabuk sehingga tidak bisa mengontrol dirinya serta tidak bisa berpikir positif. Selain itu, klien juga mempunyai kebiasaan melihat film porno melalui media sosial sehingga menyebabkan perilaku seksualnya menjadi meningkat. Di samping juga tidak adanya komunikasi secara terbuka antara orang tua dengan klien mengenai masalah seksual sehingga berakibat penyimpangan perilaku seksual klien.³

Dengan demikian berdasarkan fakta kejadian tersebut, maka penyebab anak melakukan tindak pidana asusila karena faktor pergaulan, faktor keluarga dan faktor teknologi informasi. Faktor pergaulan yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana asusila adalah ikut-ikutan melakukan seperti apa yang temannya lakukan. Selanjutnya, dari segi faktor keluarga adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya. Adapun dari segi faktor teknologi informasi adalah anak sering menonton video porno sehingga tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan

³ Djaka Sutedjo. 2014. *Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pelaksanaan Diversi di Dalam Perkara Anak*. Madiun: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Timur. Hal. 10-11.

tersebut dimaksudkan untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Akan tetapi, terdapat perbedaan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan anak. Muhammad Mustofa menyatakan bahwa kenakalan anak dibedakan dengan pelaku perbuatan pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: (1) dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun; (2) kenakalan anak biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; (3) dalam menangani kenakalan anak, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap perbuatan pelanggarannya dan (4) meskipun sudah terdapat perubahan tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitikberatkan pada aspek hukum dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu.⁴

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan.⁵

⁴ Muhammad Mustofa. 2007. *Kriminologi*. Jakarta : FISIP UI Press. Hal. 67.

⁵ Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan I. Bandung: Mandar Maju. Hal. 1.

Anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha untuk membina serta mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Fenomena kejahatan anak ini janganlah dianggap sebagai fenomena yang berakar pada kekurangan pribadi pelakunya, melainkan lebih dipandang sebagai gejala kegagalan dan disorganisasi dalam masyarakat.

Tujuan pokok diadakannya sidang anak bukanlah untuk menghukum si anak, melainkan mendidik kembali (*re-educate*), dan memperbaiki kembali setelah diadili (*rehabilitate*) agar mereka sebagai tunas bangsa yang pernah tergelincir, kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, selama dalam persidangan hakim melakukan upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak di pengadilan mengingat kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan

⁶ Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia. Hal. 11.

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum.
2. Untuk menjelaskan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk menjelaskan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian bisa lebih memperjelas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum.
2. Diharapkan hasil penelitian bisa lebih memperjelas tentang pemidanaan

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbang saran bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan.

E. Orisinalitas

Penelitian mengenai: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Persidangan di Pengadilan Negeri: Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan”, sepengetahuan penulis masih jarang ditemukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Namun demikian, penelitian dengan judul yang hampir sama, penulis temukan dalam jurnal publikasi Universitas Mataram. Penelitian tersebut dilakukan oleh Ahmad Junaidi (2014) dengan judul “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Lapas Anak Kelas III Mataram)”.⁷

Dalam penelitian tersebut menitikberatkan pada anak yang sedang menjalani proses pembedaan dan pembinaan di lapas anak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada anak yang sedang menjalani proses peradilan di tingkat pengadilan negeri, dengan demikian

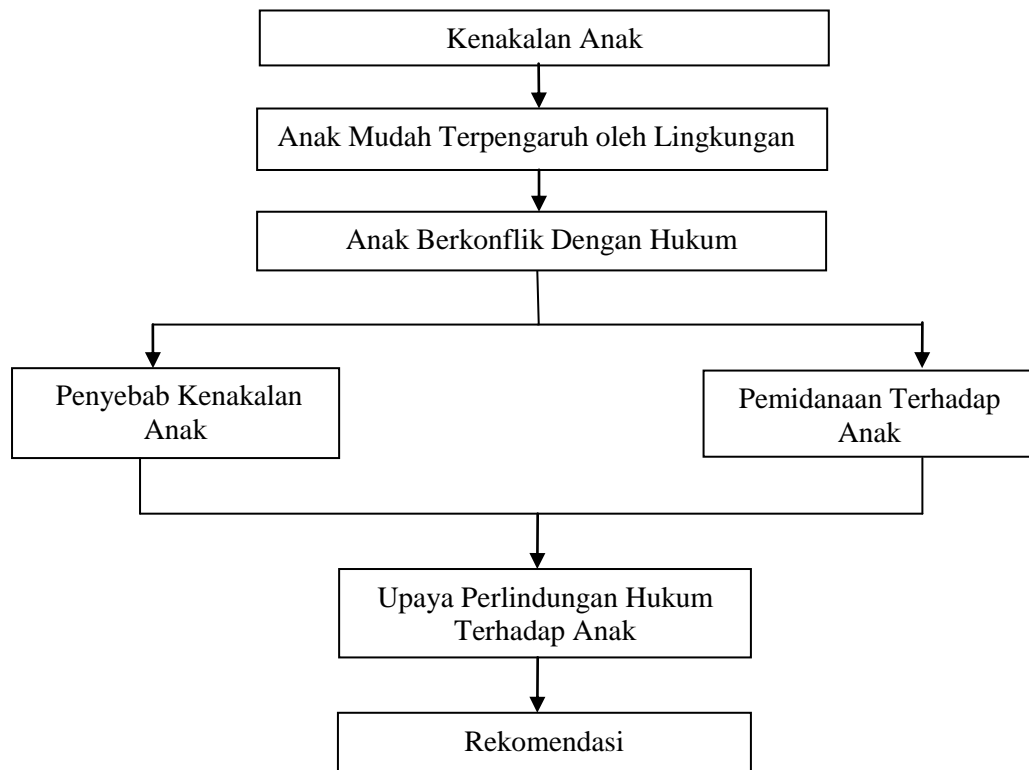
⁷ Ahmad Junaidi. 2014. “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Lapas Anak Kelas III Mataram)”. *Jurnal Publikasi*. Mataram: Universitas Mataram. Hal.1.

terdapat perbedaan status hukum anak dari anak yang sedang menjalani proses pemidanaan dengan anak yang sedang menjalani proses peradilan di pengadilan, sebab dalam proses peradilan di pengadilan tersebut akan ditentukan apakah anak terbukti atau tidak terbukti sebagai pelaku tindak pidana dan/atau terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Selain itu sumber data primer dalam penelitian tersebut menggunakan teknik wawancara terhadap anak yang sedang menjalani proses pemidanaan dan pembinaan di Lapas Anak Kelas III Mataram, sedangkan sumber data primer dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik wawancara dengan hakim yang menangani perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Magetan, dengan demikian terdapat perbedaan antara sudut pandang antara anak yang melakukan tindak pidana yang sedang menjalani proses pemidanaan dan pembinaan di lapas anak, dengan sudut pandang hakim yang mengadili perkara anak, sebab secara psikologis anak pada umumnya belum dapat menyadari tentang perbuatannya, sedangkan hakim merefleksikan berbagai sudut pandang terutama dari sudut pandang hukum untuk mengadili perkara anak. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan Ahmad Junaidi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian lain dilakukan oleh Sarwirini (2011) dengan judul “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya”. Dalam penelitian ini aspek kajian normatifnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis aspek kajian

permasalahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwirini. Perbedaan tersebut terletak pada kajian permasalahan, dimana penelitian yang dilakukan oleh Sarwirini menggunakan peraturan lama sedangkan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru.⁸

F. Kerangka Pemikiran



Bagan 1. Kerangka Pemikiran

⁸ Sarwirini. 2011. "Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya". *Perspektif*, Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal.244.

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental anak sehingga harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena masa anak-anak masih belum mampu memiliki jiwa dan emosi yang stabil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Saat ini, sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang kadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya, sehingga kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan anak. Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin mereka lakukan.

Dengan adanya keadaan tersebut di atas, dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan perbuatan pidana. Adanya persamaan kedudukan baik orang dewasa ataupun anak-anak di hadapan hukum, maka

tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak pun juga harus diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dan tindakan kekerasan serta diskriminasi sanksi pidana. Anak juga wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu secara hukum, ekonomi, sosial maupun budaya dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberi gambaran secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Deskripsi juga dilakukan terhadap berbagai konsep yang relevan dengan penelitian ini, misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sifat analitis penelitian ini dimaksudkan selain memberi gambaran, juga berusaha menganalisis

gambaran yang diperoleh mengenai konsep-konsep yang relevan dalam penelitian ini sehingga dapat mengambil kesimpulan yang logis, sistematis dan mudah dipahami berkaitan dengan masalah yang dibahas.⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pemahaman permasalahan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan negeri.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Magetan. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Pengadilan Negeri Magetan sudah ada putusan hakim terhadap anak berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Magetan sudah menerapkan UU SPPA dalam mengadili anak yang berkonflik dengan hukum.

⁹ HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press. Hal.111.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap hakim yang menangani perkara pidana anak, sekaligus sebagai *key informant* dalam penelitian ini. Adapun *key informant* dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Magetan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Termasuk dalam sumber data ini adalah buku-buku serta dokumen lain. Juga berbagai literatur lain berupa peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari buku-buku literatur, jurnal maupun artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan negeri.
 - 3) Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier biasanya diperoleh dari kamus maupun ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Wawancara dilakukan dengan informan kunci (*key informant*) yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan utama sehingga informan ini merupakan orang-orang yang dinilai dapat memberikan informasi nyata tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Wawancara dilakukan terhadap hakim yang menangani perkara

pidana anak, sekaligus sebagai *key informant* dalam penelitian ini.¹⁰

Adapun *key informant* dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Magetan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif yang berupa dokumen. Dokumen atau data sekunder merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan sesuatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dalam penulisan hukum ini, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola dan suatu uraian dasar. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.¹²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini terdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasinya yang

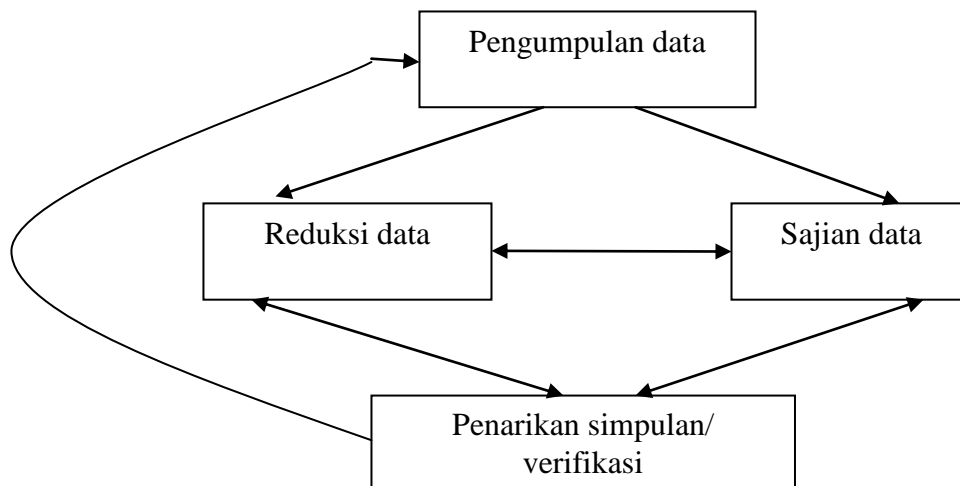
¹⁰ Burhan Bungin. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. Hal. 67.

¹¹ HB. Sutopo. *Op.Cit.* Hal. 54.

¹² Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. Hal. 15.

merupakan rangkaian kegiatan analisis secara berurutan dan saling berkorelasi satu dengan yang lain sehingga terbentuk suatu siklus. Dengan model ini peneliti tetap bergerak dalam komponen analisis seperti tersebut di atas.

Reduksi dan sajian data disusun pada waktu penulis sudah mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yaitu hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan negeri. Dalam mereduksi data, penulis menyisihkan data-data yang tidak diperlukan dan mengambil data yang diperlukan. Untuk penyajian data penulis membuat dalam bentuk narasi yang disusun secara logis. Apabila masih terdapat kekurangan data, dengan menggunakan waktu yang tersedia, maka peneliti dapat kembali melakukan penelitian untuk pengumpulan data demi kemantapan kesimpulan. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, penulis mulai melakukan untuk menarik kesimpulan yang didasarkan pada semua yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Teknik Analisis Data

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis dimaksudkan untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dan maksud tesis secara jelas. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi kajian teori yang terdiri dari: Tinjauan Tentang Kenakalan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana dan Teori Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga berisi penelitian yang relevan.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses persidangan di pengadilan.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.